

KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PADA KANTOR KELURAHAN SIDODADI KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

*The Quality Of Public Services At The Sidodadi Overall Office, Wonomulyo Subdistrict, Polewali Mandar District,
Especially In Terms Of Building Construction Permits (IMB)*

Edwin Ade Permana¹, Guntur Karnaeni², Syamsul Bahri³

Mahasiswa, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa
Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Republik Indonesia
²Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: syamsul.bahri@universitasbosowa.ac.id

Diterima : 19 Pebruari 2019

Dipublikasikan : 12 April 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas layanan publik di Kantor Keseluruhan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terutama dalam hal izin konstruksi bangunan (IMB) dan Mengetahui serta menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi layanan publik di Sidodadi secara Keseluruhan Kantor, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam hal mengatur izin bangunan (IMB). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggali fakta tentang kualitas pelayanan publik di Desa Sidodadi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, sekretaris dan staf desa dan masyarakat, sehingga total informan dalam penelitian ini adalah 13 orang. Hasil dari penelitian ini adalah: Kualitas pelayanan publik di Desa Sidodadi cukup baik. Hal ini konsisten dengan hasil wawancara dengan lima aspek kualitas layanan, yaitu: Tangibility, Reability, Responsiviness, Assurance, dan Empaty (Empathy) memperoleh hasil yang memuaskan, kecuali untuk fasilitas berupa ruang parkir sempit dan ruang tunggu adalah sedikit panas. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja layanan terdiri dari faktor kemampuan dan fasilitas infrastruktur.

Kata kunci: Kinerja, Layanan, Publik

ABSTRACT

This study aims to find out and describe the quality of public services at the Sidodadi Overall Office, Wonomulyo Subdistrict, Polewali Mandar District, especially in terms of building construction permits (IMB) and Knowing and describing the factors that influence public services in the Sidodadi Overall Office, Wonomulyo Subdistrict, Polewali Mandar District in particular in the case of arranging building permits (IMB). The research method used is a qualitative method with the type of descriptive research aims to explore the facts about the quality of public services in Sidodadi Village. The research informants consisted of village heads, secretaries and village staff and the community, so that the total informants in this study were 13 people. The results of this study are: The quality of public services in Sidodadi Village is fairly good. This is consistent with the results of interviews with five aspects of service quality, namely: Tangibility, Reability, Responsiviness, Assurance, and Empaty (Empathy) obtain satisfactory results, except for facilities in the form of a narrow parking space and the waiting room is a little hot. While the factors that influence service performance consist of factors of ability and infrastructure facilities.

Keywords: Performance, Service, Public

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya pendapatan, teknologi, dan pendidikan, semakin meningkat pula kualitas keinginan dan tuntutan kepuasan masyarakat pengguna jasa terhadap pelayanan yang ditawarkan dari sektor pelayanan publik. Disamping hal tersebut sektor pelayanan publik juga dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa serta harus selalu melakukan perbaikan pelayanan secara berkesinambungan.

Adanya peningkatan kualitas keinginan dan tuntutan kepuasan masyarakat pengguna jasa tersebut, kantor kelurahan selaku kantor pelayanan publik juga dituntut untuk bisa selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat pengguna jasa. Peran kantor kelurahan cukup penting untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus surat-surat penting sesuai yang telah diatur pemerintah. Oleh karena itu pelayanan pada kantor kelurahan harus

baik agar masyarakat tidak malas untuk mengurus kewajiban mereka di kantor kelurahan sebab ini bisa menghambat program-program pemerintah yang sudah dijalankan. Maka profesionalisme dari petugas kelurahan dan sarana penunjang sangat penting. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan dikelurahan sangat diperlukan adanya kerjasama pelayanan yang baik di antara pihak - pihak yang terkait. Dengan adanya kerjasama pelaksanaan pelayanan yang baik maka diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik pula sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa. Dengan puasnya masyarakat pengguna jasa atas kinerja pelayanan di kelurahan maka diharapkan masyarakat tidak akan merasa malas untuk datang ke kelurahan sehingga tidak menghambat program-program pemerintah yang telah dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, pada tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 45.269 jiwa, dimana 70% merupakan umur produktif bekerja (Data BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2017). Berdasarkan data kelurahan, sebanyak 30 orang masyarakat sekitar yang melakukan permohonan untuk melakukan pembangunan secara bersamaan baik rumah, ruko dan gedung-gedung bertingkat, dalam pembangunannya tersebut harus membutuhkan perijinan dari pihak kelurahan (Data Kelurahan Sidodadi, 2018). Proses pelayanan yang diberikan, pada saat observasi awal berlangsung berada pada kategori kurang baik menurut peneliti. Hal ini disebabkan, pada saat proses pelayanan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pegawai, yakni salah satunya kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Dalam hal ini, jumlah komputer yang beroperasi untuk pengurusan berkas-berkas hanya satu, sehingga pegawai harus bergantian dalam melayani masyarakat. Lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai, membuat penumpukan berkas pada Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) tentang “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Pengertian pelayanan menurut Kotler (Sinambela, dkk, 2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006: 136) mendefinisikan pelayanan publik adalah pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian. Kualitas pelayanan

pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian serius oleh aparat pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
- b. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Sarana dan prasarana. Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Permohonan IMB gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB. IMB gedung diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah pusat melalui proses permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah. Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang diberikan oleh pemerintah Polewali Mandar, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah. Kegiatan pendataan bangunan gedung baru dilakukan bersamaan dengan proses IMB gedung untuk keperluan tertib bangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)?.

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo

Kabupaten Polewali Mandar khususnya dalam hal pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui gambaran serta menganalisis Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data dan membuat kesimpulan serta laporan. Metode kualitatif merupakan proses berpikir yang dimulai dari data-data yang terkumpul kemudian diambil secara umum. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama metode kualitatif ini lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan langsung dengan kenyataan, kedua menyajikan langsung hubungan antara peneliti dengan responden dan lebih peka, serta dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

Narasumber penelitian dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Kabag Ortala, 1 (satu) orang Kasubag Kerjasama Pertanahan dan Kesbangpol dan 1 (satu) orang Verifikator 1 (satu) orang. Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian akan dilakukan triangulasi (*cross check*) kepada 4 (empat) orang informan triangulasi yakni Kasubag Humas dan Komunikasi 1 (satu) orang, Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 (satu) orang, Staf Bagian Hukum 1 (satu) orang dan Staf Bagian Administrasi Kesra 1 (satu) orang. Keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar (2) Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (3) Data Rekapitulasi Verifikasi Hasil Kerja Pegawai.

Juli 2018 dan masyarakat Pulau Sembilan yang telah berdiam minimal selama lima tahun. Sampel penelitian untuk wisatawan lokal/nusantara ditetapkan secara accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data, maka dapat digunakan sebagai sampel. Setiap wisatawan yang dijumpai di lokasi penelitian langsung diambil sebagai responden. Sementara untuk sampel masyarakat lokal ditetapkan sebanyak 42 orang, dengan rincian tokoh masyarakat sebanyak 12 orang dimana ada perwakilan masing-masing desa, mahasiswa 2 orang, pegawai pemerintah 2 orang, pegawai swasta 2 orang, dan masyarakat umum lainnya sebanyak 24 orang yang terdiri dari pedagang, nelayan, dan pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: Teknik

kuesioner adalah bentuk pertanyaan terstruktur yang diberikan kepada responden sesuai dengan masalah penelitian. Teknik Pengamatan atau observasi meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik

Jenis data Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survey lapangan menyangkut obyek yang akan diteliti dan disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal ini pencatatan dan pengamatan langsung mengenai kondisi obyek wisata pada Pulau Sembilan. Data juga diperoleh dari wawancara terhadap responden berupa wisatawan dan masyarakat lokal pada lokasi penelitian.

Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data tersebut berupa : Data kebijakan pemerintah yang menyangkut pariwisata; fasilitas infrastruktur pariwisata yang ada di lokasi penelitian; data kunjungan wisatawan; keadaan geografis dan demografis; data sosial budaya dan ekonomi, dll.

Sumber data Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari : Kantor Bappeda, dan Dinas Tata Ruang untuk memperoleh data mengenai kebijaksanaan yang ada di lokasi penelitian; Kantor Dinas Pariwisata untuk memperoleh data kunjungan wisatawan, fasilitas, dan kebijakan sektor pariwisata di lokasi penelitian; kantor statistik, dan Kantor pemerintahan kecamatan untuk memperoleh data geografis dan demografis; survey lapangan teknik analisis data menggunakan SWOT yang sebagian besar dijarah melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Polewali Mandar di apresiasi dalam bentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil wawancara mendalam, semua subjek penelitian menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dalam hal ini Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan yang berada diluar gaji pokok pegawai yang diberikan berdasarkan laporan kerja pegawai. Kebijakan ini memberikan semangat kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan tugas tambahan yang telah diberikan. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini membantu Pegawai Negeri Sipil memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan tentang pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai

pada Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup jelas tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh subjek penelitian menyatakan informasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai cukup bagus, dimana sosialisasi terkait kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh OPD Lingkup Kabupaten Polewali Mandar. Pada teknis pelaksanaan kebijakan ini memperlihatkan transmisi yang baik sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan bahwa Bagian Ortaga setiap bulannya mengirim surat ke setiap bagian pada Sekretariat Daerah perihal pemberitahuan besaran 1 bobot poin dalam rupiah dan batas waktu pengumpulan Hasil Kerja Pegawai.

Hasil penelitian yang disampaikan oleh subjek penelitian yang mengatakan bahwa sumber daya berupa anggaran yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar cukup memenuhi kebutuhan PNS sehingga maksud dari Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai mulai terwujud. Di lain hal sumber daya berupa fasilitas untuk melaporkan Hasil Kerja Pegawai tidak memadai dengan sulitnya PNS menginput HKP secara *online* di sebabkan kapasitas server yang kurang mendukung PNS mengakses aplikasi SIMKP secara bersamaan dalam satu waktu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya (anggaran) pada Sekretariat Daerah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan terkait sumber daya (fasilitas) belum dapat sepenuhnya mendukung kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini telah meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS serta meningkatkan kesejahteraan PNS. Hal ini terlihat dari keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan 95%, faktor pendukung implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah yaitu sumber daya (anggaran), sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah sumber daya (fasilitas)

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, M John, 2000. Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Burhan, N 1994 Perencanaan Strategik, Pustaka Bina-man Pressindo, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. Destinasi Banda Neira Brand Pariwisata Indonesia Timur. Edisi Pertama. Kaki Langit Kencana: Jakarta.
- Fiatiano, Edwin. Tata Cara Mengemas Produk Pari-wisata pada Daerah Tujuan Wisata ,(Online), (<http://journal.unair.ac.id/.../Tata%20Cara%20Mengemas%20Produk%20Pariwisata.pdf>, diakses 4 juni 2018).
- Ilyas, Muhammad. 2009. Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una. Tesis. Makassar: Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Jamaluddin A, Mursyid. 2016. Tradisi Mappatabe' dalam Masyarakat Bugis Kecamatan Pulau Sinjai kabupaten Sinjai.
- Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2017.
- Kecamatan Pulau Sembilan Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2017
- Laporan Akhir RIPPDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai
- La Ode Unga, Kartini. 2017. Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda Tesis Makassar Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Novel Feris. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat. Tesis. Yogyakarta Program Studi Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada
- Program Pascasarjana Universitas Bosowa. 2017. Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah
- Pitana, Gde, dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Rangkut, Freddy, (2001), Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- RENSTRA (Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sinjai) Tahun 2013-2018.
- Rahim R. Nilai –Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddi Press.
- Spillane, James J 1994 Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Kebudayaan, Kanisius, Yogyakarta.
- Suwantoro, Gamal 2001, Dasar-Dasar Pariwisata, Andi Yogyakarta.